

Apakah Kurva Phillips Eksis Pada Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19?

Ernawati^{1,*}, Mansyur Asri²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Jalan HEA Mokodompit, Anduonohu, Kode Pos 93232, Kendari, Indonesia

² Program Studi Sistem Informasi, STMIK Catur Sakti, Kendari, Indonesia
Jalan H. Abdullah Silondae No.109, Kecamatan Mandonga, Kode Pos 93111, Kendari, Indonesia

Email: ^{1,*}ernawaty@uho.ac.id, ²mansyur.asri12@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ernawaty@uho.ac.id

Submitted: 22/02/2022; Accepted: 27/02/2022; Published: 28/02/2022

Abstrak—Periode pandemic Covid-19 mendorong melemahnya permintaan akan produk barang dan jasa. Tingkat harga yang terbentuk cenderung rendah. Sementara tingkat pengangguran cenderung tinggi akibat melemahnya permintaan tersebut. Pola ini tampak sesuai dengan pandangan Phillips mengenai trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, apakah fenomena kurva Phillips berlaku pada perekonomian Indonesia masa pandemi Covid-19. Data penelitian diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan unit analisis 34 provinsi tahun 2020. Data dianalisis menggunakan korelasi dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurva Phillips tidak eksis untuk kasus Indonesia secara nasional, namun hanya eksis pada Kawasan Timur Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat inflasi dan pengangguran pada kelompok provinsi yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi dengan yang tidak menerapkan PSBB. Temuan ini merekomendasi upaya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih sejalan dengan pencapaian tujuan stabilitas harga bagi kebijakan moneter dan penurunan pengangguran bagi kebijakan fiskal.

Kata Kunci: Inflasi; Pengangguran; Kurva Phillips; Pandemi; Covid-19

Abstract—The Covid-19 pandemic has resulted in low demand for goods and services. The price level tends to be low. Meanwhile, the unemployment rate tends to be high due to weak demand. This condition appears to be in line with Phillips' view of the trade-off between the inflation rate and unemployment. This study aims to examine whether the Phillips curve phenomenon applies to the Indonesian economy during the Covid-19 pandemic. The research data was obtained from the publication of the Statistics Indonesia (BPS) with 34 provinces of analysis unit, period 2020. The data were analyzed using correlation and difference tests. The results show that the Phillips curve does not exist for the case of Indonesia nationally, but only exists in the Eastern Region of Indonesia. The results also show that there is no significant difference between inflation and unemployment rates in the group of provinces that implement Large-Scale Social Restrictions (pembatasan sosial berskala besar, PSBB) during the pandemic and those that do not implement PSBB. This paper recommends a more streamlined coordination of monetary and fiscal policies with the goal of achieving price stability for monetary policy and reducing unemployment for fiscal policy.

Keywords: Inflation; Unemployment; Phillips Curve; Pandemic; Covid-19

1. PENDAHULUAN

Kurva Phillips menggambarkan adanya *trade-off* antara tingkat inflasi dan pengangguran. Inflasi merupakan kenaikan harga-haraga secara umum secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap suatu penyakit, namun juga sebagai obat dalam perekonomian. Secara teoritis, inflasi yang dianggap sebagai obat dan pendorong kinerja ekonomi yaitu inflasi akibat kenaikan permintaan. Sementara inflasi yang dianggap sebagai penyakit ekonomi yaitu inflasi karena desakan biaya. Kenaikan permintaan secara umum akan mendorong produsen meningkatkan produksinya agar memperoleh potensi penghasilan. Sementara inflasi desakan biaya timbul sebagai dampak kenaikan biaya produksi yang mendorong kenaikan harga produk. Inflasi desakan biaya akan menyebabkan produksi menurun dan meningkatkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak ketidakmampuan perusahaan untuk membayar upah. Pada masa pandemi Covid-19, fenomena inflasi maupun deflasi terjadi pada beberapa provinsi. Berdasarkan data BPS (2022), provinsi yang mengalami deflasi yaitu Sulawesi Utara dan Papua Barat, sementara provinsi lainnya mengalami inflasi sebesar 0,29-3,46 persen.

Perekonomian masa Covid-19 juga menunjukkan adanya peningkatan pengangguran. Data BPS (2021a) menunjukkan bahwa terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, 2,56 juta orang, diantaranya menganggur. Pengangguran umumnya terjadi pada sektor-sektor yang terkait dengan layanan jasa pengangkutan, dan perdagangan hotel restoran. Sebab sektor-sektor ini merupakan sektor dengan kontraksi ekonomi terdalam. Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi ekonomi sebesar 15,04 persen, sementara Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 10,22 persen. Sektor lain yang mengalami kontraksi yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa lainnya (BPS, 2021b). Pemberlakuan pembatasan sosial telah mendorong melemahnya permintaan akan sektor tersebut. Permintaan yang menurun, berdampak pada tidak terjualnya jasa/produk dari produsen, sehingga produsen kurang mampu memberi kompensasi bagi karyawannya. Pada akhirnya, PHK menjadi jalan bagi produsen untuk bertahan dalam kondisi pandemi. Secara teoritis, penurunan permintaan dalam kondisi penawaran yang melimpah menyebabkan produsen menurunkan harga produknya agar masih dapat menjangkau pasar potensial. Dengan demikian kami mengasumsikan bahwa dalam

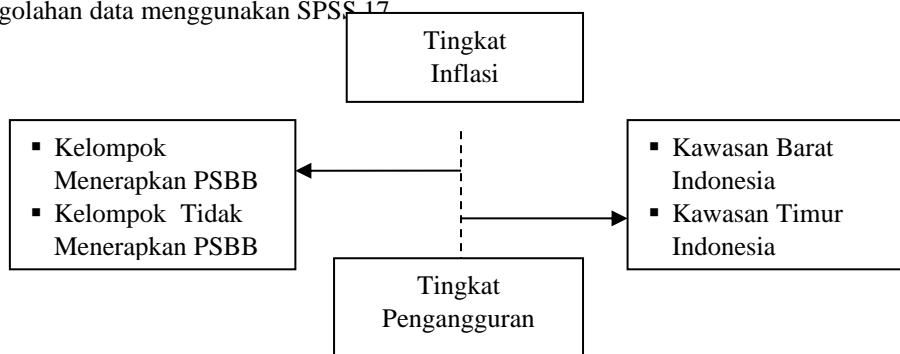
kondisi pandemi, hubungan pengangguran dan tingkat harga (inflasi) adalah berbanding terbalik. Atau pada masa pandemi, terdapat *trade-off* antara tingkat inflasi dan pengangguran, dimana dalam kondisi tingkat harga relatif rendah, pengangguran meningkat. Atau dengan kata lain, hubungan inflasi dan pengangguran pada masa pandemi sejalan dengan Kurva Phillips.

Penelitian sebelumnya telah membuktikan *trade-off* antara inflasi dan pengangguran yang sejalan dengan kurva Phillips sebagaimana penelitian Liargovas & Psychalis (2022); Umer et al. (2021); Yayar & Tekgun (2022). Beberapa penelitian lain menunjukkan fenomena kurva Phillips tidak berlaku dalam suatu perekonomian, sebagaimana temuan Krulický et al. (2022); Omer Mustafa (2021). Kajian hubungan antara inflasi dan pengangguran pada kasus Indonesia dilakukan oleh Astuti (2016) untuk periode estimasi 1986-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi inflasi dan pengangguran adalah negatif, namun tidak signifikan, begitupun halnya dengan hubungan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki koefisien korelasi yang negatif dan tidak signifikan. Hasil ini berbeda dengan temuan Maichal (2012) untuk periode estimasi 2000Q1-2010Q3 yang melakukan studi menggunakan metode GMM dan menyimpulkan bahwa fenomena kurva Phillips eksis pada perekonomian Indonesia.

Studi sebelumnya mengkaji fenomena kurva Phillips pada periode ekonomi yang belum mengalami pandemi. Pada sisi lain, kajian tentang fenomena tersebut untuk kasus Indonesia menggunakan data nasional. Kami beranggapan bahwa perekonomian pada masa pandemi yang ditandai dengan resesi ekonomi selain berdampak pada pengangguran, juga berdampak pada tingkat inflasi. Sebab pada masa resesi, permasalahan ekonomi timbul dari melemahnya permintaan. Kami juga meyakini bahwa terdapat perbedaan pola hubungan inflasi dan pengangguran pada provinsi dengan angka kejadian infeksi Covid-19 yang luar biasa dengan provinsi dengan infeksi sedang, yang ditandai dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Oleh karena itu tulisan bertujuan untuk mengungkap apakah periode Covid-19 berdampak pada hubungan tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori ekonomi khususnya model Kurva Phillips periode pandemi. Pada sisi lain, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengambil kebijakan dalam menentukan target inflasi (bagi otoritas moneter) dan target penurunan pengangguran (bagi otoritas fiskal) pada masa resesi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder publikasi Badan Pusat Statistik dengan periode estimasi masa pandemi tahun 2020. Unit analisis yaitu 34 provinsi di Indonesia. Data pengangguran diperoleh dari tingkat pengangguran terbuka periode Agustus 2020, sementara tingkat inflasi yang diestimasi setiap provinsi merupakan tingkat inflasi umum tahunan (2018=100) pada ibu kota provinsi. Analisis dilakukan beberapa tahapan (gambar 1), yaitu dengan membagi provinsi di Indonesia berdasarkan kawasan (Kawasan Barat dan Timur), dan berdasarkan kebijakan penerapan PSBB tahun 2020. Pengelompokan provinsi yang masuk dalam kategori kelompok yang menerapkan PSBB yaitu provinsi yang memiliki minimal 1 kabupaten/kota yang mengambil kebijakan PSBB, dan atau provinsi yang menerapkan kebijakan PSBB secara regional provinsi. Berdasarkan kriteria ini, terdapat 14 provinsi yang masuk dalam kelompok yang pernah menerapkan PSBB. Data dianalisis menggunakan korelasi dan uji beda. Sebelum melakukan uji beda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Kriteria uji normalitas data berdasarkan signifikansi Kolmogorov-Smirnov, dimana jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov > 0,05, maka data diasumsikan berdistribusi normal. Pada sisi lain, dalam tahap prosedur uji beda, juga dilakukan pengujian homogenitas melalui F test (Levene's Test). Jika signifikansi Uji Levene > 0,05, berarti varians kedua kelompok sama, maka uji-t menggunakan asumsi varians yang sama, dan sebaliknya jika Levene's Test < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa varians dari dua kelompok berbeda, maka uji t menggunakan varian yang sama tidak diasumsikan. Pengolahan data menggunakan SPSS¹⁷

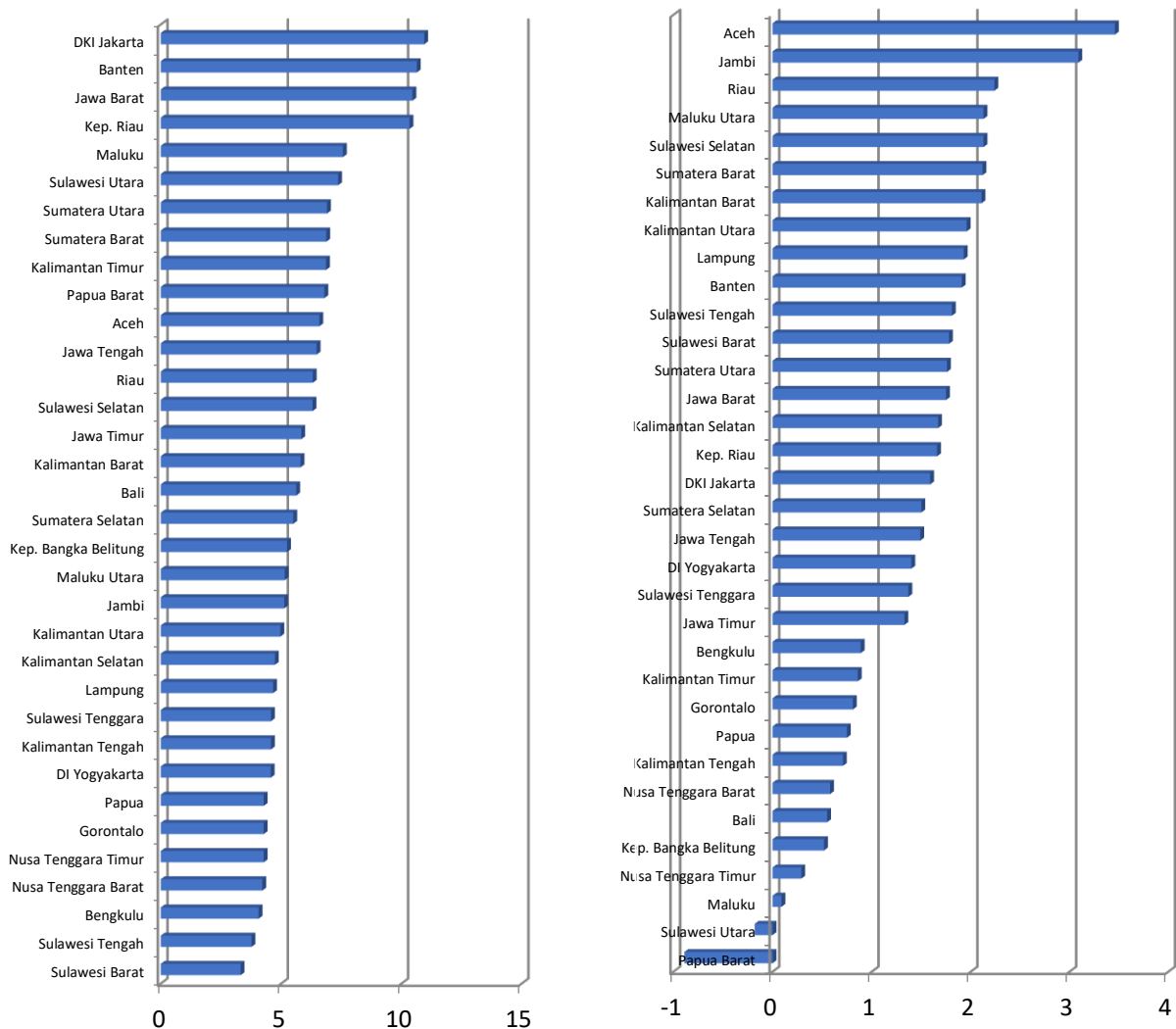


Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi pengangguran dan inflasi berdasarkan provinsi di Indonesia sebagaimana Gambar 1 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami tingkat pengangguran tertinggi pada masa Covid-19 yaitu DKI Jakarta, kemudian Banten, dan

Jawa Barat. Adapun provinsi dengan angka pengangguran terbuka yang sangat rendah yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu. Pada sisi lain, provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Aceh, kemudian Jambi dan Riau. Sementara provinsi yang mengalami tingkat inflasi terendah yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Utara dan Maluku. Berdasarkan pola ini, tampak bahwa pola variasi tinggi rendahnya angka pengangguran tidak konsisten dengan pola variasi tinggi rendahnya laju inflasi pada berbagai provinsi di Indonesia.



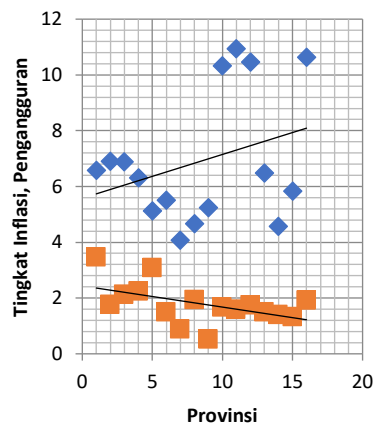
(a) Tingkat Pengangguran Terbuka

(b) Tingkat Inflasi Umum

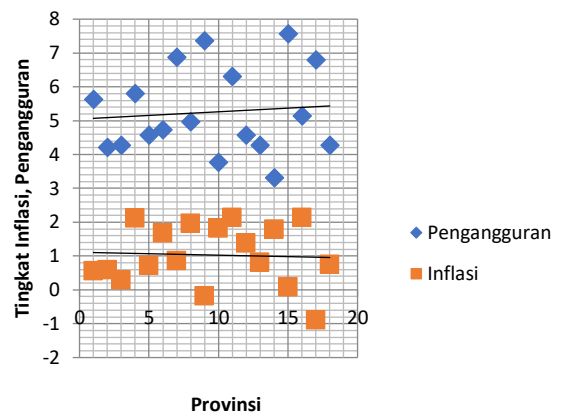
Gambar 1. Tingkat Pengangguran dan Inflasi Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020

Sumber: BPS (2021)

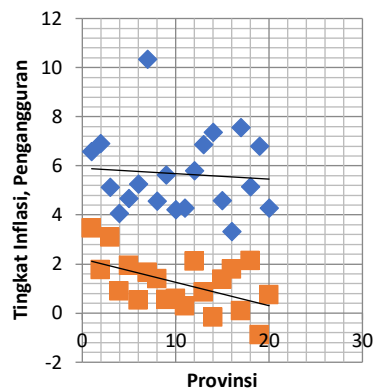
Gambar 2 menyajikan hubungan antara inflasi dan pengangguran pada masa pandemi untuk Kawasan Barat dan Timur Indonesia yang menunjukkan arah berlawanan, sementara hubungan inflasi dan pengangguran pada provinsi yang tidak menerapkan PSBB menunjukkan arah yang searah. Adapun hubungan inflasi dan pengangguran pada wilayah yang menerapkan PSBB menunjukkan pola yang berlawanan. Arah yang saling berlawanan antara inflasi dan pengangguran mengimplikasikan bahwa peningkatan inflasi akan mendorong penurunan pengangguran, sementara implikasi dari pola searah dari hubungan inflasi dan pengangguran yaitu, peningkatan inflasi sebanding dengan peningkatan pengangguran.



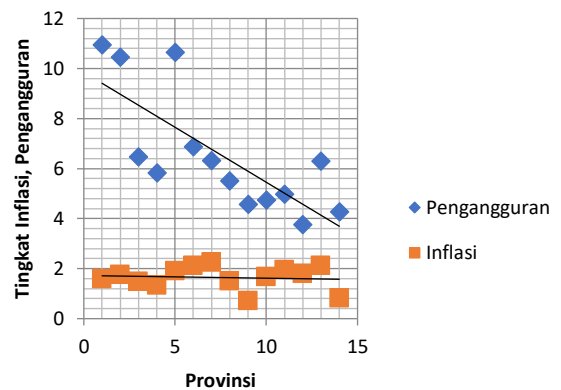
(a) Provinsi Kawasan Barat Indonesia



(b) Provinsi Kawasan Timur Indonesia



(c) Provinsi Yang Tidak Menerapkan PSBB



(d) Provinsi Yang Menerapkan PSSBB

Gambar 2. Garis Linear Hubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Estimasi Penelitian
 Sumber: BPS (2021)

Uji korelasi dilakukan untuk mengkaji apakah hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia memiliki hubungan signifikan. Adapun uji normalitas dilakukan sebelum uji korelasi Pearson, sebagaimana Tabel 1. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z inflasi sebesar 0.698, dan pengangguran sebesar 0.386 dan lebih besar dari dari 0.05 menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi maupun pengangguran berdistribusi normal.

Tabel 1. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Inflasi	Pengangguran
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.387	6.034
	Std. Deviation	0.890	2.013
	Most Extreme Differences		
	Absolute	0.121	0.155
	Positive	0.114	0.155
	Negative	-0.121	-0.106
Kolmogorov-Smirnov Z		0.708	0.905
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.698	0.386

Sumber: Hasil Output Olah Data SPSS

Hasil uji korelasi sebagaimana Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 4 kelompok yang diestimasi, hanya kelompok Kawasan Timur Indonesia yang memiliki hubungan signifikan antara inflasi dan pengangguran yang ditunjukkan oleh probabilitas $0.084 < 0.10$. Hubungan antara inflasi dan pengangguran pada kelompok ini juga menunjukkan *tade-off* atau arah yang berlawanan atau negatif. *Trade-off* inflasi dan pengangguran juga tampak pada Provinsi yang Tidak Menerapkan PSBB, namun memiliki probabilitas $0,747 > 0,10$ atau tidak signifikan.

Tabel 2. Hasil Pengujian Korelasi Hubungan Tingkat Inflasi dan Pengangguran di Indonesia

Kelompok	Deskripsi	Nilai Estimasi
Kawasan Barat Indonesia	Korelasi	0,087
	t-Stat.	0,327
	Prob.	0,749
Kawasan Timur Indonesia	Korelasi	-0,419
	t-Stat.	-1,846
	Prob.	0,084
Provinsi yang Tidak Menerapkan PSBB	Korelasi	-0,077
	t-Stat.	-0,327
	Prob.	0,747
Provinsi yang Menerapkan PSBB	Korelasi	0,297
	t-Stat.	1,077
	Prob.	0,303
Indonesia	Korelasi	0,257
	t-Stat.	1,245
	Prob.	0,226

Sumber: Data Sekunder, diolah

Levene's test penelitian disajikan sebagaimana tabel 3. Hasil pengujian Levene tingkat inflasi menunjukkan signifikansi F sebesar 0,006, dengan kata lain varians dari kedua kelompok berbeda sehingga digunakan indikator *Equal variances not assumed* dalam interpretase uji beda. Adapun hasil Levene's test tingkat inflasi menunjukkan signifikansi F sebesar 0,224, dengan kata lain varians dari kedua kelompok sama sehingga digunakan indikator *Equal variances assumed* dalam interpretase uji beda

Tabel 3. Hasil Uji Beda Tingkat Inflasi dan Pengangguran Berdasarkan Kelompok Provinsi dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Variabel		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Tingkat Inflasi	<i>Equal variances not assumed</i>	8,629	0,006	-1,621	27,501	0,116	-0,437	0,269
Tingkat Pengangguran	<i>Equal variances assumed</i>	1,534	0,224	-1,268	32	0,214	-0,882	0,695

Sumber: Data Sekunder, diolah

Hasil uji beda tingkat inflasi sebagaimana Tabel 3 berdasarkan kelompok yang menerapkan PSBB dan yang tidak menerapkan sebesar 0,116 > 0,05 atau tidak signifikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan inflasi antara wilayah yang menerapkan PSBB dengan yang tidak menerapkan PSBB, meskipun inflasi yang terbentuk pada wilayah yang menerapkan PSBB lebih tinggi dibanding wilayah yang tidak menerapkan PSBB sebagaimana disajikan pada tabel 4. Pada sisi lain, perbedaan tingkat pengangguran antara wilayah yang menerapkan PSBB dan tidak menerapkan PSBB menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,224 > 0,05 atau tidak signifikan. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan tingkat pengangguran antara wilayah yang menerapkan PSBB dan yang tidak menerapkan PSBB.

Tabel 4. Nilai Mean Berdasarkan Kelompok Provinsi dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Variabel	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tingkat Inflasi	Provinsi yang Tidak Menerapkan PSBB	20	1,208	1,072	0,240
Tingkat Pengangguran	Provinsi yang Menerapkan PSBB	14	1,644	0,459	0,123
Tingkat Inflasi	Provinsi yang Tidak Menerapkan PSBB	20	5,671	1,648	0,369
Tingkat Pengangguran	Provinsi yang Menerapkan PSBB	14	6,552	2,413	0,645

Sumber: Data Sekunder, diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran hanya signifikan pada kawasan Timur Indonesia dimana inflasi dan pengangguran memiliki hubungan negatif mengikuti model kurva Phillips. Kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya (Bhattarai, 2016; Nautwima & Asa, 2021; Omran & Bilan, 2021). Temuan Sasongko et al. (2019) yang mengkaji *trade-off* antara inflasi dan pengangguran pada 33 provinsi di Indonesia menemukan bahwa *trade-off* antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terbuka merupakan fenomena ekonomi jangka pendek, sehingga kondisi *sticky price* tetap diterapkan. Pada sisi lain, temuan penelitian menunjukkan tidak ada korelasi antara inflasi dan pengangguran baik pada kelompok wilayah yang menerapkan PSBB maupun yang tidak. Temuan ini sejalan

dengan penelitian Astuti (2016). Lisani et al. (2020) meneliti hubungan inflasi dan pengangguran di negara ASEAN-10 selama periode 1989-2018, dan menemukan hubungan inflasi-pengangguran tidak signifikan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang signifikan, sehingga kurva Phillips hanya berlaku dalam jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan inflasi antara wilayah yang menerapkan PSBB dengan wilayah yang tidak menerapkan PSBB, meskipun tingkat inflasi pada wilayah yang menerapkan PSBB lebih tinggi dibanding wilayah yang tidak menerapkan. Inflasi dapat merupakan fenomena moneter dan riil. Inflasi yang bersumber dari fenomena moneter akan dikendalikan melalui kebijakan moneter. Inflasi merupakan fenomena moneter jika disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang beredar. Kebijakan yang ditempuh otoritas moneter untuk mengendalikan laju inflasi yaitu kebijakan moneter ketat melalui peningkatan suku bunga acuan, yang kemudian berdampak terhadap penurunan permintaan agregat, yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi. Jalur penurunan suku bunga acuan hingga menurunkan inflasi tampak melalui beberapa jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu: jalur suku bunga, jalur kredit, jalur harga asset, dan jalur nilai tukar. Dampak peningkatan suku bunga acuan melalui jalur suku bunga dan kredit yang disalurkan, akan mempengaruhi investasi. Peningkatan suku bunga acuan, akan meningkatkan suku bunga pasar uang antar bank, karena itu suku bunga kredit. Tingginya suku bunga kredit, akan mendorong investor untuk menahan kegiatan investasi. Adapun peningkatan suku bunga acuan akan mempengaruhi harga asset, akan berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Sementara dampak peningkatan suku bunga acuan terhadap nilai tukar, akan mempengaruhi ekspor. Penurunan aktivitas investasi, konsumsi, dan ekspor akan menurunkan permintaan agregat. Selanjutnya penurunan permintaan ini akan menurunkan laju inflasi.

Sementara inflasi merupakan fenomena riil jika inflasi disebabkan oleh *demand-pull inflation*, *cost-push inflation* ataupun perilaku pembentukan harga dipasar persaingan tidak sempurna melalui *price setter* atau perilaku *mark-up pricing*. Inflasi akibat fenomena riil, dikendalikan oleh kebijakan fiskal. Perilaku *mark-up pricing* akan meningkatkan inflasi jika produsen yang berada pada pasar persaingan tidak sempurna menetapkan harga yang relatif tinggi untuk meningkatkan laba. Sebab, konsumen yang berada pada pasar dengan struktur persaingan tidak sempurna memiliki *bargaining power* yang rendah dalam penentuan harga. *Demand-pull inflation* akan meningkatkan harga jika sumber daya untuk kegiatan produksi tidak cukup tersedia, sehingga produsen memiliki *lag* dalam produksi. Keterbatasan sumber daya dapat disebabkan oleh keterbatasan bahan baku, teknologi, maupun faktor musim. Dengan permintaan yang tinggi, dan penawaran yang terbatas, maka akan mendorong harga-harga cenderung naik. Sebaliknya dengan penurunan permintaan, akan mendorong harga-harga cenderung menurun atau inflasi rendah. Fenomena inflasi rendah ini tampak pada masa pandemic Covid periode 2020, dimana inflasi rata-rata di Indonesia sebesar 1,39%. Rendahnya inflasi ini ternyata tidak berdampak pada tingkat pengangguran. Angka pengangguran terus meningkat selama tahun 2020. Temuan Sasongko et al. (2019) menunjukkan bahwa inflasi pada 33 provinsi di Indonesia lebih berciri *demand-pull inflation* dan bukan karena *cost-push inflation*.

4. KESIMPULAN

Hubungan tingkat inflasi dan pengangguran berdasarkan kurva Phillips adalah berlawanan atau negatif, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi, *trade-off* inflasi dan pengangguran ini hanya berlaku bagi provinsi yang tergabung dalam Kawasan Timur Indonesia, sementara *trade-off* ini tidak dialami oleh provinsi yang terletak pada Kawasan Barat Indonesia. Secara nasional, *trade-off* antara inflasi dan pengangguran di Indonesia juga tidak terbukti signifikan, sehingga pada masa Covid-19, kurva Phillips tidak eksis di Indonesia. Hasil uji beda juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan inflasi maupun tingkat pengangguran pada kelompok provinsi yang menerapkan PSBB dan kelompok yang tidak menerapkan PSBB. Tidak terdapatnya *trade-off* antara tingkat inflasi dan pengangguran, serta tidak terdapatnya perbedaan signifikan antara kelompok yang menerapkan PSBB dan tidak menerapkan PSBB, menunjukkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi lebih mudah, dimana kebijakan moneter dengan target stabilitas harga dan kebijakan fiskal dengan penurunan pengangguran akan dapat dicapai beriringan, tanpa harus mengorbankan salah satu tujuan tersebut, apakah tingkat inflasi rendah namun tingkat pengangguran tinggi, atau tingkat pengangguran rendah disertai tingkat inflasi tinggi.

REFERENCES

- Astuti, P. B. (2016). Analisis Kurva Phillips dan Hukum Okun di Indonesia Tahun 1986-2016. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 72–91. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v15i1.72>
- Bhattacharai, K. (2016). Unemployment-inflation trade-offs in OECD countries. *Economic Modelling*, 58, 93–103. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.007>
- BPS. (2021a). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- BPS. (2021b). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- BPS. (2022). *Inflasi 90 Kota (Umum) 2022*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/3/1708/1/inflasi-90-kota-umum-.html>
- Krulický, T., Šanderová, V., & Dolejš, D. (2022). Evaluation of inflation and unemployment and plotting the Philips curve of the Czech Republic. *SHS Web of Conferences*, 132. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202213201007>
- Liargovas, P., & Psychalis, M. (2022). Phillips Curve: The Greek Case. *European Review*, Vol. 30.



<https://doi.org/10.1017/S1062798720001301>

- Lisani, N., Masbar, R., & Silvia, V. (2020). Inflation-Unemployment Trade-Offs In ASEAN-10. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(2), 241–256. <https://doi.org/10.15408/sjie.v9i2.16346>
- Maichal, M. (2012). Kurva Phillips di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 183–193. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.178>
- Nautwima, J. P., & Asa, A. R. (2021). The Relationship Between Inflation and Unemployment in Namibia Within the Framework of the Phillips Curve. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 7(5), 7–16. <https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.75.2001>
- Omer Mustafa, O. A. (2021). Inflation and Unemployment Trade-off: Is Phillips Curve True for African Developing Countries? Evidence from Sudan. *Journal of Economic Science Research*, 4(3). <https://doi.org/10.30564/jesr.v4i3.3243>
- Omran, E. A. M., & Bilan, Y. (2021). The impact of inflation on the unemployment rate in Egypt: a VAR approach. *SHS Web of Conferences*, 107. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110706009>
- Sasongko, G., Huruta, A. D., & Gultom, Y. N. V. (2019). Does the phillips curve exist in indonesia? A panel granger causality model. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(3), 1428–1443. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3\(26\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(26))
- Umer, M., Galadima, M. D., & Abbasi, B. N. (2021). Empirical Analysis of the Phillips Curve and Okun's Law Through Simultaneous Equation Modeling: A Case Study of Pakistan. *Ekonomista*, 1(3), 418–438. <https://doi.org/10.52335/dvqigjyjkff19>
- Yayar, R., & Tekgun, B. (2022). Phillips Curve Analysis in D8 Countries. *Izmir İktisat Dergisi*, 37(2), 334–349. <https://doi.org/10.24988/ije.819082>